





























mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki pendidikan yang ada.

- c. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan, norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing didunia global
- d. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team work, kerjasama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu
- e. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah dan mengembangkan program baru



pendidikan disuatu lembaga tersebut. Serta akan menyebabkan kualitas *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Untuk membantu para profesional pendidikan yang termasuk dalam prinsip-prinsip mutu pendidikan, maka diperlukan Manajemen Mutu Total (MMT) yang merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. Manajemen total dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara dekolah, dunia bisnis dan pemerintah. Ikatan tersebut akan memungkinkan para professional disekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan pogram mutu. Manajemen Mutu Total (MMT) merupakan metodologi yang mempermudah mengelola perubahan, membentuk fokus perubahan, membentuk infrasturktur yang lebih fleksibel, cepat merespon pada tuntutan perubahan masyarakat serta membantu pendidikan dalam mengatasi hambatan-hambatan biaya dan waktu.

Sekolah yang menerapkan manajemen mutu total, sekolah tersebut melaksanakan pogram mutu pendidikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berfokus pada kustomer, setiap anggota dari sekolah adalah pemasok (*supplier*) dan pengguna (*customer*). Ada dua macam pengguna (*customer*), yaitu pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal seperti: orang tua, sisiwa, guru, administrator, staf dan majelis sekolah. Sedangkan pengguna eksternal seperti: masyarakat, pimpinan perusahaan













kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian. Relevansi internal menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum.

- b) Prinsip *fleksibilitas* (lentur), maksudnya kurikulum mempersiapkan anak didik untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang dan juga bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dalam pelaksanaan kurikulum memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak didik.
- c) Prinsip *kontinuitas* (berkesinambungan), maksudnya perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan tidak terputus-putus atau berhenti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya dan juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.
- d) Prinsip *praktis*, maksudnya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip efisiensi. Betapun bagus dan idealnya kurikulum kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan.
- e) Prinsip *efektivitas* (ketepatangunaan), maksudnya walaupun kurikulum tersebut harus murah, sederhana dan murah tetapi keberhasilannya tetap

harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas.

Jika salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum diatas tidak dilaksanakan maka, kurikulum tidak dapat dijadikan pedoman pengembangan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala potensi alam, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana yang ada pada setiap daerah dengan demikian materi kurikulum tidak seluruhnya mengacu pada pusat, tetapi berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat seperti kesenian, muatan local sejarah, ilmu bumi, dan pengetahuan alam. Agar efektif dan efisien, desentralisasi kurikulum harus disertai dengan desentralisasi sistem evaluasi, artinya setiap daerah menentukan sistem evaluasi sendiri. Oleh karenanya muncul kurikulum terpadu disekolah-sekolah umum maupun agama pada dasarnya merupakan manifestasinya dari keinginan yang sangat mendasar dari setiap pengelola lembaga pendidikan untuk memberikan sistem pendidikan yang lebih kondusif dan terintegrasi antara kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik siswa sehingga diharapkan out put lembaga pendidikan tersebut memiliki nilai plus yang siap pakai ditengah masyarakat.

Dalam pengembangan kurikulum ada tiga tahap kegiatan atau pengembangan kurikulum, yaitu: Penyusunan desain kurikulum, implementasi





Azas pendidikan ditetapkan Pancasila Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950

- b. Rencana Pelajaran Terurai 1952, kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952
- c. Kurikulum 1968, bersifat politis maksudnya mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya ada Sembilan.
- d. Kurikulum 1975, menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep dibidang manajemen, yaitu MBO (*Management By Objective*).
- e. Kurikulum 1984, mengusung *process skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL).
- f. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999, dalam kurikulum 1994 GBPP-nya tidak rinci, hanya berupa topik atau pokok bahasan yang rincian dan proses pembelajarannya dikembangkan sendiri oleh sekolah

atau guru-guru. Kurikulum 1994 menempatkan guru-guru bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, melainkan juga sebagai pengembang kurikulum (perencana, pelaksana, penilai dan penyempurna kurikulum).

- g. Kurikulum 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum 2004, adalah kurikulum dalam pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994, perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem caturwulan. Sedangkan dalam kurikulum baru ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan IPTEK tanpa meninggalkan kerja sama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi di sini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski begitu pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek dan setiap kegiatan siswa ada nilainya.
- h. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, pada awal tahun 2006 ujicoba KBK dihentikan dan muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan





Dari prinsip-prinsip diatas, pembelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan program dan memberikan pelayanan kepada setiap siswa agar mereka dapat berkembang secara maksimum sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Guru sebagai fasilitator harus mampu memberikan pelayanan dalam kegiatan belajar-mengajar agar siswa dapat berkembang potensinya dan mampu mewujudkan peluang untuk berprestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Kurikulum ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dimasa depan. Dalam implementasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, telah dilakukan berbagai studi yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan sebagai konsekuensi dari suatu inovasi pendidikan. Sebagai salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas implementasi kurikulum dikembangkan berbagai model implementasi kurikulum. Sesuai dengan amanat KTSP, bahwa model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan. Kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik harus mempunyai potensi untuk memilih metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntutan kurikulum.





disusun berdasarkan pandangan ilmu jiwa asosiasi, yaitu mengharapkan terjadinya kepribadian yang bulat berdasarkan potongan-potongan pengetahuan. Maksudnya, kurikulum bentuk terpisah ini sangat menekankan pada pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan. Ciri-ciri dari kurikulum ini adalah mata pelajaran diklasifikasikan serta diorganisasikan sesuai dengan bidang keilmuan/pengetahuan ilmiah.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam kurikulum yang bersifat *Separate-subject-curriculum*, yakni: kelebihan adalah bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis dan berkesinambungan, kurikulum bentuk ini mudah dilaksanakan dan mudah pula untuk diadakan perubahan jika diperlukan, bentuk kurikulum ini memudahkan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran karena memang disusun secara terurai dan sistematis. Sedangkan kekurangan *separate-subject-curriculum* ini adalah kurikulum bentuk ini memberikan mata pelajaran secara terpisah-pisah hal ini memungkinkan terjadinya pemerolehan pengalaman secara lepas-lepas tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kurikulum bentuk ini kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual dalam kehidupan sehari-hari dan tujuan kurikulum ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang lain seperti perkembangan emosional dan sosial.





telah dipadukan menjadi satu mata pelajaran dengan satu nama. Contohnya: penggabungan antara mata pelajaran berhitung, aljabar dan ilmu ukur menjadi satu nama matematika. Penggabungan antara beberapa mata pelajaran menjadi satu itu disebut sebagai *broad-fields* artinya suatu kesatuan yang tidak terbagi dalam bagian-bagian. Akan tetapi, pada kenyataannya masih berupa kumpulan bidang-bidang studi tertentu yang jumlah bahan pelajarannya dikurangi, sehingga tidak sepadat dan seluas bahan pelajaran sebelum bidang-bidang studi tersebut digabungkan. *Broad-fields* ini pada dasarnya menyatukan beberapa mata pelajaran yang sejenis. Dalam sistem pendidikan *broad-fields* dikembangkan dengan nama bidang studi seperti Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan lain-lain. Oleh karena itu, *broad-fields* sebenarnya hanya *subject-centered* dalam bentuk lain, yaitu *subject-centered* yang telah dimodifikasi dari sifatnya yang tradisional.

Ada tiga jenis korelasi yang sifatnya bergantung kepada jenis mata pelajaran:

- Korelasi faktual, misalnya dalam mata pelajaran sejarah dan kesastraan, fakta-fakta sejarah disajikan melalui penulisan karangan sehingga menambah kemungkinan menikmati bacaannya oleh para siswa.

























pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu berdaya saing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut.

Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup perkembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil dimasa yang akan datang. Dengan demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan kurikulum sekolah yang berbasis pada kompetensi peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional dan tujuan pendidikan serta memerhatikan potensi anak didik. Oleh karena itu, dirumuskannya kurikulum terpadu diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas terhadap hasil out put dan suatu lembaga



senantiasa dilakukan. Mengingat kurikulum harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan dan pembaharuan suatu kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari perubahan/pembaharuan, yang sifatnya fundamental atau konseptual yang melandasi semua aspek dari sistem kurikulum maupun perubahan pembaharuan yang sifatnya penyempurnaan struktur kurikulum. Perubahan kurikulum menyangkutpautkan banyak pihak maka didalam mengubah kurikulum itu perlu dipertimbangkan faktor-faktor manusia (*human factors*), yaitu: guru, peserta didik, staf administrasi sekolah, pemakai lulusan, serta pihak lain yang mungkin terlibat dalam sistem pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kurikulum di lembaga pendidikan harus disusun sedemikian rupa untuk membentuk manusia yang terampil dan produktif agar output atau lulusan dituntut agar dapat bekerja sebagai manusia mandiri, terlatih, mampu bersaing dan bermutu. Tetapi, hal ini tergantung juga pada gurunya. Walaupun betapa hebatnya kurikulum itu disusun seperti apapun, kalau gurunya tidak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan berhasil dengan baik pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan. Sebenarnya bukan hanya standar nasional pendidikan yang terkait dengan standar isi saja tetapi juga standar penilaian. Standar kompetensi lulusan itu menjadi acuan-acuan di dalam mengembangkan kurikulum. Sehingga dimungkinkan nantinya guru-guru itu mempunyai kompetensi plus. Dengan demikian hanya guru-guru yang mampu memfasilitasi peserta didik belajar dengan baik yang nantinya akan mengantarkan



peserta didik menguasai kemampuan-kemampuan yang tinggi-tinggi, sehingga bisa ditandingkan dalam kompetisi-kompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerintah melalui program-program pendidikan sebenarnya telah berusaha untuk terus memperbaiki sistem pendidikan dan mutu material (kurikulum) pendidikan di Indonesia. Usaha ini tercermin dalam berbagai perubahan kurikulum yang pernah ada, mulai dari kurikulum 1968, Kurikulum 1975, kurikulum 1984, Kurikulum 1994, KBK dan KTSP. Tampak sekali hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki sistem dan mutu materi pendidikan di Indonesia. Usaha “uji coba” kurikulum ini melupakan substansi dari tujuan pendidikan yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi hak setiap warga negara.

Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan semakin serius dan tidak bisa ditawar lagi dengan diterbitkannya Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Permendiknas No 63 Tahun 2009 memberikan arahan yang jelas tentang penjaminan mutu pendidikan. Ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk penjaminan mutu pendidikan yakni:

*Pertama*, melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam melakukan pemetaan mutu sekolah oleh pihak sekolah sendiri secara jujur dan transparan sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang dihadapi dalam penjaminan mutu pendidikan, selanjutnya bisa dirumuskan rekomendasi atau langkah nyata dalam

penjaminan mutu pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah merupakan langkah proaktif untuk mengeliminasi ketidakjujuran sekolah dalam menempuh evaluasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah.

*Kedua*, melakukan Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah (MSPD). Adapun Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan sesuai dengan UU Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah dituntut mampu melakukan monitoring yang terkait dengan penjaminan mutu sekolah.

Penyelenggaraan otonomi daerah semestinya mendorong terjadinya proses otonomi pendidikan di tingkat daerah. Adanya Otonomi daerah dan otonomi penyelenggaraan pendidikan daerah bertujuan agar pengelolaan dan menyelenggarakan pendidikan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan daerah yang bermutu dan adil. Hasil dari otonomi daerah dan otonomi pendidikan adalah *out put* yang cerdas secara nasional dan arif dalam tingkatan lokal. *Out put* yang cerdas dan arif ini secara umum akan membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, berhasil dan produktif sesuai dengan konteks dimanapun ia berada.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sekolah-sekolah terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha

membangun pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Berdasarkan prinsip utama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah ditentukan secara nasional adalah pemberian amanah secara penuh kepada instansi sekolah untuk merancang dan merencanakan sendiri pembelajaran sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan sekolah. Prinsip ini dimungkinkan untuk mendirikan sekolah sebagai institusi yang dianggap tahu betul tentang kondisi dan karakteristik peserta didik, manajemen sekolah serta sarana prasarana pembelajaran. Dengan demikian, analisis kebutuhan dan daya dukung serta kemampuan sekolah dengan sendirinya menjadi acuan dan pertimbangan dalam penyusunan, perencanaan dan perancangan pembelajaran.

Dalam implementasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, telah dilakukan berbagai studi yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan sebagai konsekuensi dari suatu inovasi pendidikan. Sebagai salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas implementasi kurikulum dikembangkan berbagai model implementasi kurikulum. Sesuai dengan amanat KTSP, bahwa model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan. Karena pembelajaran terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk

menerima, menyimpan dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, bermakna, autentik dan aktif. Perolehan keutuhan belajar, serta kebulatan pandangan tentang kehidupan, dunia nyata dan fenomena kehidupan hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu.

Dengan menerapkan kurikulum terpadu ini diharapkan akan membentuk anak didik menjadi pribadi yang *integrated*, yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan sekitarnya, orang yang hidup bahagia hidup di dunia dan akhirat dengan memiliki ilmu umum dan tidak melupakan ilmu agama, orang yang hidup harmoni dengan lingkungannya karena apa yang diajarkan di sekolah sesuai dengan kehidupannya diluar sekolah serta dapat membantunya dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan diluar sekolah. Dengan penerapan kurikulum terpadu ini diharapkan untuk menghasilkan *out put* yang berkualitas sehingga tujuan lembaga pendidikan dan sesuai harapan masyarakat tercapai atau stakeholder akan merasa puas. Dengan tercapainya tujuan dan kepuasan masyarakat maka mutu pendidikan di lembaga tersebut dapat dikatakan telah berhasil .

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (*content*) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan

suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;

- Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
- Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat progres pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, afektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang bersangkutan mengenai output yang telah dicapai maupun mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.